

KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh : Drs. T. Syarifuddin, M.Si.
(Dosen Fisipol Unida Prodi Pembangunan
Sosial/Sosiatri)

1. Pendahuluan

Di tengah perkembangan kemajuan dunia yang sedang bergulir semua negara akan menghadapi berbagai tantangan dalam mensejahterakan rakyatnya terutama menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai akibat dari globalisasi tersebut membuat antara negara yang satu dengan negara lain seakan tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu sebuah negara akan dapat saling mempengaruhi satu sama lain terutama di bidang politik yang berlandaskan ketertiban dunia, di bidang ekonomi, dan yang sangat kuat adalah sosial budaya. Menurut (Katz dalam Tjokrowinoto, 1995)

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya perubahan menuju keadaan dan situasi yang lebih baik. Tertinggal menjadi maju, tradisional menjadi modern, bodoh menjadi pandai, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat.

Timbulnya banyak masalah pembangunan pada sebuah negara didominasi oleh pengaruh negara maju yang kuat di bidang ekonomi dan Iptek atas negara berkembang. Pada zaman ini kemajuan teknologi komunikasi, informasi serta industrialisasi membawa banyak

perubahan sosial budaya yang sangat luar biasa sebagai tantangan dalam kehidupan kebangsaan. Lebih mendasar efek dari pada globalisasi yang menjurus kepada modernisasi akan lebih dalam mempengaruhi moralitas masyarakat.

Berbagai masalah sosial bisa saja terjadi seperti kejahatan, konflik antar Ras, kemiskinan, perceraian, pelacuran, *delinkwensi* (kenakalan) anak-anak, remaja, dan orang tua, penyalahgunaan narkotika, bunuh diri, dan sakit jiwa. Fenomena gelandangan dan pengemis di musim-musim bulan tertentu dan jelang lebaran juga tidak asing lagi terjadi di kota-kota besar.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang juga tidak terlepas dengan tantangan tersebut. Di daerah Aceh tidak hanya karena globalisasi, kemajuan teknologi, konflik dan tsunami telah

membawa daerah ini menghadapi berbagai masalah sosial. Masalah kemiskinan masih tetap menjadi beban dalam masyarakat. Menurut data BPS “Persentase penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan) di Aceh pada Maret 2014 sebesar 18,05 persen, meningkat 0,45 persen dibandingkan Maret 2013 yang sebesar 17,6 persen,” (BPS Aceh : Profil Kemiskinan Maret 2014, <http://aceh.bps.go.id/?r-brs/view&id=417>, diakses 29-11-014). Kemudian masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) meskipun kurangnya data yang valid tentang masalah ini karena disebabkan oleh berbagai faktor dan bersifat musiman, namun peningkatan jumlah gepeng di pusat-pusat ibu kota juga dirasakan. Persoalan kemiskinan dapat dikatakan merupakan sumber yang bermuara pada masalah kesejahteraan sosial yang harus dihadapi oleh bangsa ini.

Begitu juga masalah ganja

sudah menjadi potret buram bagi daerah Aceh seakan Aceh sebagai daerah lumbung ganja, sebagian besar tanaman ganja yang tertangkap di ruas jalan tran Sumatera disebut berasal dari Aceh. Hal ini megindikasikan pemuda Aceh tidak banyak terserap di lapangan kerja (pengangguran) akhirnya tergiur dengan menanam ganja. Kondisi ini membawa kesan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat sebagai bentuk dari masalah sosial yang seakan tidak dapat terpecahkan. Masalah sosial adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh semua orang, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat. Menurut P.A.F. Walter dalam Sartono Wirjo Soemarto, (1990:45) menyebutkan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang merupakan ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, dan mempengaruhi bagi sejumlah warga masyarakat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa setiap kondisi kehidupan yang tidak

menyenangkan dalam masyarakat yang merusak keharmonisan sosial perlu diawasi dengan suatu usaha bersama setiap elemen masyarakat dan pemerintah. Untuk pemecahan berbagai masalah sosial ini memerlukan dukungan semua pihak agar secara perlahan-lahan dapat ditanggulangi.

Mengantisipasi berbagai permasalahan itu, maka setiap aktifis sosial memiliki kesempatan dan wewenang untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya menekankan pada ekonomi semata. Namun segala aspek yang akan mendukung untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kuat harus selalu dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Diharapkan ketimpangan pemahaman masyarakat tentang pembangunan tidak semakin parah. Agar cita - cita kesejahteraan

masyarakat dari berbagai aspek dapat diupayakan oleh masyarakat sendiri, dan juga dengan proses pengembangan masyarakat kekuatan luar yang tidak sehat tidak mempunyai celah untuk mencoba mengusik kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik ada masalah besar saat ini yang harus disikapi oleh perguruan tinggi memberikan kontribusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya, yaitu : Bagaimana mengembangkan kesiapan sumber daya manusia mengantisipasi masalah sosial menjadi masyarakat mandiri dan kuat menghadapi tuntutan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?

2. Arti Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Menurut Indah Meitasari, (2013) “Pembangunan” seringkali diartikan pertumbuhan yang bermakna material, dan senantiasa dihubungkan dengan ekonomi atau pertumbuhan (*growth oriented*). Namun sebenarnya pembangunan harus memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh semua sehingga tidak merugikan orang atau pihak lain, karena berhasil membangun harkat martabat manusia. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata mengabaikan hakekat manusia yang direduksi menjadi obyek atau materi, bukan menjadi subyek dari pembangunan. Seharusnya manusia sebagai orientasi pembangunan, sehingga dinamakan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Manusia diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang bersifat sosial dengan tujuan utama adalah *Human*

Development. Hal ini merupakan paradigma pembangunan yang disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centred development*),

Ciri pembangunan yang berpusat pada manusia adalah manusia sebagai tujuan akhir dari aktivitas pembangunan dan bukan hanya sebagai alat. Sehingga apapun yang dihasilkan dari pembangunan yang bersifat fisik, harus menghasilkan pembangunan manusia (*human development*), yang dicapai melalui alat ukur, salah satunya yaitu *Human Development Index* yang mengukur lama hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Terdiri dari : angka harapan hidup, angka melek huruf, daya beli, rata-rata lama bersekolah, pemerataan pendapatan dan ketimpangan jender. Indah Meitasari,

(<http://jakarta.kompasiana.com/sosial-budaya/2013/01/29/pembanguna>

n-sosial-jakarta-529042.html, diakses 30-11-014).

Selanjutnya Midgley (2005: 25) mendefinisikan Pembangunan Sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang berhubungan dengan proses dinamis dalam pembangunan ekonomi.

Sedangkan tujuan pembangunan sosial budaya menurut batasan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai antara lain meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya kebudayaan dan prestasi

olahraga. Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa pembangunan sosial merupakan suatu kegiatan yang membawa perubahan pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai subyek pembangunan.

Terkait dengan hal itu antara lain ada tiga tantangan pokok yang sangat mendesak dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama di Aceh. Tantangan *pertama*, adalah globalisasi, konflik dan tsunami yang dapat memudahkan kekuatan asing yang tidak memihak negara dapat masuk secara perlahan. Tantangan *kedua* industrialisasi yang mempunyai akibat yang luas terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak perdagangan bebas yang akan membawa efek akan mudah hilang kemandirian masyarakat yang terlalu bergantung pada kekuatan asing. Tantangan *ketiga*, yang juga

memprihatinkan pada saat ini kegagalan pembangunan (*Distorted Development*) banyak didominasi oleh kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia tidak merata. Itu artinya adanya masyarakat yang lemah dan yang kuat tidak berjalan seimbang. Kita bisa melihat banyak sekali saat ini pengusaha-pengusaha besar baik dari kalangan sendiri ataupun asing yang beruntung memanfaatkan kelemahan masyarakat yang lemah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ketiga tantangan tersebut merupakan kegagalan pembangunan terhadap negara-negara berkembang ternyata tidak saja oleh faktor-faktor kendali, seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang otoriter, perang dan perpecahan, namun juga oleh kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan perhatian yang besar

terhadap pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Midgley menyebut *Distorted Development*yang pembangunan ekonominya tidak disertai dengan suatu tingkat yang memadai dari pembangunan bidang sosial....kegagalan untuk mengharmonikan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dan juga menjamin bahwa keuntungan dari kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, *Midgley (2005: 4)*. Kegagalan yang terjadi adalah kegagalan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan obyektifitas pembangunan bidang sosial. Misalnya: pendapatan perkapita tinggi tetapi masih banyak yang pengangguran, pembangunan perumahan yang masif tapi perkampungan kumuh masih banyak, dan lainnya. Selain itu, pengalaman dan kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang, selain karena

pendekatan yang keliru yaitu terlalu terpusat pada penekanan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas. Dalam proses pembuatan keputusan rakyat banyak tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan.

Kemudian Midgley (2005:7-10) menegaskan bahwa untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang terdistorsi ini (*distorted development*) memang dibutuhkan perspektif baru dalam upaya pembangunan, perspektif baru tersebut adalah “Perspektif Pembangunan Sosial”.

Kesejahteraan sosial diterjemahkan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 tentang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan rakyat Indonesia menjelaskan bahwa, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejalan dengan itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 58/HUK/2008 menegaskan bahwa Kesejahteraan Sosial memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Maksud dari pengertian dan ketentuan di atas jelas bahwa Negara berkewajiban memberikan hak pada setiap warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak sejahtera lahir dan bathin.

Sedangkan masalah kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah tidak layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Syahruman (2011), <http://sosbud.kompasiana.com/1/12/24/masalah-kesejahteraan-sosial-dan-pekerjaan-sosial-di-indonesia-424943.html>, diakses 1-12-2014. Dengan demikian dalam menanggulangi masalah sosial maka bidang kesejahteraan merupakan sasaran utama diperhatikan karena masalah ini meliputi dimensi yang

komplek dalam pembangunan sosial.

Pada tingkat yang paling dasar, mengacu pada ADB (1990) dan UNDP (2003) dalam Sumardjo, (2010), Kesejahteraan manusia yang beradab adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu : Kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia. Faktanya perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraannya. Di sinilah peran pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi mengembangkan suasana yang kondusif bagi upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara beradab dan berkeadilan (bermartabat).

3. Kontribusi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar kemajuan bangsa, tempat mempersiapkan sumber daya manusia pelaksana pembangunan terutama pembangunan bidang kesejahteraan sosial, sudah semestinya merespon secara tepat sesuai tridharma yang diembannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang kurikulum perguruan tinggi yang berbasis pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial, diimplementasikan melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Perumusan kurikulum kearah ini harus dilandasi pada pemikiran bahwa untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat dibutuhkan upaya peningkatan kapital manusia (*human capital*) dan kapital sosial (*social capital*) dalam bentuk pemberdayaan yang menjadi dasar bagi pengembangan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan bangsa. Di samping itu untuk mengembangkan kapital manusia dan kapital sosial selain melalui investasi sosial, dibutuhkan pula lingkungan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang kondusif, seperti penegakan hak azasi manusia (*human right*), kepastian hukum (*social justice*), serta menghargai martabat manusia (*human dignity*). Hal ini menjadi pemacu dan keharusan untuk terwujudnya kesejahteraan sosial.

Universitas Iskandarmuda suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan bidang kajian pembangunan sosial dan kesejahteraan telah mengembangkan kurikulum 4. berkontribusi dalam proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini program studi Sosiatri/Pembangunan Sosial salah satu prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan sosial memegang peranan utama dalam : (1) mengembangkan sumber daya manusia dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan, serta konsep alternatif kebijakan pembangunan sosial melalui aktifitas penelitian, dan (3) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat (berkeadilan dan berperadaban).

4. Kontribusi Keilmuan Sosiatri/Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Keberadaan program studi/keilmuan Sosiatri/Pembangunan Sosial Fisipol Unida sebagai satu-satunya prodi yang ada di luar pulau Jawa yaitu Aceh di ujung barat pulau

Sumatera sejak tahun 80-an adalah didorong oleh semangat dan tuntutan masyarakat dalam upaya menanggulangi kelainan sosial kemasyarakatan (*Social Disorganized*) dan adanya kesenjangan sosial sebagai dampak dari berkembangnya pembangunan kawasan-kawasan industri besar di Daerah Istimewa Aceh yang ada pada tahun 1980/1981. Terjadi peledakan atau urbanisasi dan pemukiman baru sehingga sangat berdampak pada kemiskinan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat desa akibat konflik yang berkepanjangan dan krisis ekonomi di Aceh. Konflik Aceh terjadi lagi pada tahun 1998, dan secara latin konflik Aceh belum ada penyelesaian secara tuntas sampai sekarang. Oleh sebab itu, kehadiran Jurusan Ilmu Sosiatri sebagai Ilmu Pembangunan Sosial yang mempelajari kelainan-kelainan sosial sangat relevan dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah.

Program studi ini telah memberikan kontribusi dan memainkan peran penting dalam derap langkah pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pembangunan masyarakat dan telah memperkuat sumber daya manusia bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan. Berbagai hasil penelitian dan kerjasama dalam implementasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan telah memberi hasil positif.

Sejumlah alumni Sosiatri telah bekerja di berbagai instansi Pemerintah dan swasta seperti di Perguruan Tinggi, Dinas Sosial, Kantor Pemerintahan Kabupaten/kota, dan Kantor Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), anggota TNI/Polri serta di berbagai lembaga negeri dan swasta lainnya. Beberapa di antara alumni Sosiatri ada pula yang menduduki jabatan politis seperti Bupati, anggota DPRD, pejabat eselon II dan III di seluruh

Indonesia dengan jumlah alumni lebih dari 600 orang.

Selain itu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama-sama dengan mahasiswa telah menjadi tugas di Program Studi Sosiatri/Pembangunan Sosial. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan pengajaran serta dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun seminar walaupun dalam porsi yang sedikit. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, kerjasama terjalin antara lain dengan beberapa instansi di antaranya dengan Lembaga Suadaya Masyarakat *Woman Development Center* (WDC) Kota Banda Aceh, Prodi Pembangunan Sosial UGM Yogyakarta, dan Pemda Aceh Jaya. Meskipun kerjasama dengan instansi terkait dirasakan belum cukup efektif bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial, hal ini mungkin terjadi karena perguruan tinggi saat ini banyak memfokuskan

pada peningkatan kualitas dharma pendidikan dari pada pengabdian pada masyarakat. Sementara instansi terkait belum maksimal dalam upaya meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi terutama prodi Sosiatri/Pembangunan Sosial Fisipol Unida.

Sampai saat ini program studi Sosiatri/Pembangunan Sosial memperoleh peringkat Akreditasi B, dengan keputusan BAN-PT Nomor : 048/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. Pada awalnya Ilmu Sosiatri dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan sosial untuk merespon kondisi problematik yang cukup kompleks pasca kemerdekaan seperti : buta huruf, tingkat harapan hidup yang rendah, pengangguran, gelandangan, pendapatan perkapita yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Pada periode tersebut konsentrasi kajian Prodi Sosiatri adalah penyakit masyarakat. Pada perkembangan berikutnya konsentrasi kajian prodi

ini bukan hanya penyakit masyarakat tetapi juga ditambah pengembangan masyarakat. Dalam dekade terakhir konsentrasi penyakit masyarakat dirubah menjadi konsentrasi kebijakan sosial. Dengan demikian konsentrasi kajian Ilmu Sosiatri pada saat ini adalah Pembangunan Masyarakat dan Kebijakan Sosial, dan pendekatan semula individual bergeser ke *community*. Kedua konsentrasi tersebut merepresentasikan kajian mengenai upaya yang dilakukan secara integral untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang akan bermuara pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

5. Kompetensi Lulusan Prodi Sosiatri/Pembangunan Sosial Fisipol Unida

Program Studi Pembangunan Sosial merupakan studi yang mempelajari mengenai pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah sosial sehingga tercapai kesejahteraan

masyarakat. Prodi Pembangunan Sosial menggagas strategi pemecahan masalah yang efektif karena tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun juga pada strategi pasca penanganan masalah. Pendekatan pembangunan yang digunakan : Pembangunan Masyarakat (*Community Development/CD*), dan Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organizer/CO*) untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial.

Profil lulusan Prodi Pembangunan Sosial : 1. Mampu menjadi ahli pembangunan masyarakat (*community development specialist*) untuk institusi pemerintah (*state*), LSM (*civil society organization*) dan perusahaan (*corporate*). Mampu melakukan analisis kebijakan sosial untuk pemerintah dan lembaga legislatif. 2. Mampu menjadi peneliti sosial (*social researcher*), dan 3. Mampu menjadi akademisi.

Kompetensi lulusan Prodi Pembangunan Sosial dalam proses

Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Sosial adalah : 1.
Sebagai fasilitator Program-
program Pemberdayaan
Masyarakat, dan 2. Sebagai Tenaga
Ahli dalam merumuskan Kebijakan
Sosial berdasarkan persoalan yang
ada di dalam masyarakat (*bottom up
planning*).

Untuk itu pada bagian ini
dikemukakan beberapa hal pokok
yang terkait dengan kontribusi
lulusan perguruan tinggi ini yang
relevansi kurikulumnya dalam
pembangunan bidang kesejahteraan
sosial antara lain :

**Sebagai Fasilitator Program-
program Pemberdayaan
Masyarakat, yaitu :**

- a. Menjadi fasilitator dalam pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan wanita rawan sosial masyarakat (TKSM).
- b. Menjadi fasilitator dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemitraan (karang taruna, organisasi sosial, LSM, dan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), selain itu juga menjadi fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Sebagai Tenaga Ahli dalam Merumuskan Kebijakan Sosial adalah :

- a. Membuat kebijakan tentang mekanisme bantuan sosial.
- b. Membuat kebijakan tentang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- c. Membuat kebijakan tentang pengelolaan dana sosial dari pemerintah, masyarakat, dan swasta.

6. Penutup

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan adalah merupakan pilar kemajuan bangsa tempat mempersiapkan sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah

yaitu kebutuhan sumber daya manusia dalam pembangunan, terutama perguruan tinggi yang terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Program Studi Sosiatri/Pembangunan Sosial salah satu prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unida dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan sosial memegang peranan utama dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial : (1) mengembangkan sumber daya manusia dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan, serta konsep alternatif kebijakan pembangunan sosial melalui aktifitas penelitian, dan (3) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat (berkeadilan dan

berperadaban).
Program studi ini telah memberikan kontribusi dan memainkan peran penting dalam derap langkah pembangunan daerah, telah memperkuat sumber daya manusia bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan. Berbagai hasil penelitian dan kerjasama, meskipun kerjasama dengan instansi terkait belum cukup maksimal, namun dalam implementasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan telah memberi hasil positif. Sejumlah alumni telah bekerja di berbagai instansi negeri dan swasta di daerah ini. Selain kontribusi segi lulusan, dalam percepatan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kontribusi dengan pengkajian program Pemberdayaan Masyarakat, dan program Perumusan Kebijakan Sosial.:

Oleh karena itu perlu konsistensi peningkatan sinergi instansi terkait dengan perguruan

tinggi dalam hal kerjasama terutama perguruan tinggi yang membidangi kajian pembangunan sosial dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Danang A, (danang_str@yahoo.com), 28 Nov 2014, *Profil Prodi Pembangunan Sosial/Sosiatri*, E-mail kepada T. Syarifuddin (teukusyarifuddin@yahoo.com).
- James, Midgley, (2005), *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Diperta Islam Dapag RI, Jaakarta
- Rohman, Arif (2014), *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, <http://sosbud.kompasiana.com/2014/11/24/pembangunan-kesejahteraan-sosial-di-indonesia-hambatan-tantangan-dan-peluang-705615.html>, diakses 29 Nov 2014
- Syahruman, (2011), *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia*, (online), <http://sosbud.kompasiana.com/2011/12/24/masalah-kesejahteraan-sosial-dan-pekerjaan-sosial-di-indonesia-424943.html>, diakses 1 Desb 2014
- Sumardjo, (2010), *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik dalam Rangka Pengelolaan Kebun Sawit Berkelanjutan*. Kerjasama Care IPB dengan Badan Litbang Pembangunan Daerah. Pekanbaru.
- _____, (2010). *Penyuluhan Mengembangkan Kapital Manusia dan Kapital Sosial menuju Kesejahteraan*
- UNDP. 2003. *Human Development Report 2003. Millenium Development Goals: A Compact among Nationms to End Human Poverty*. Oxford University Press. New York.
- Wirjosoemarto, Sartono, (1990), *Ilmu Sosiatri Suatu Pengantar*, Fisipol UGM, Yogyakarta